



Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi publik terhadap Kinerja organisasi layanan publik

Juwainah Ria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas bhayangkara jakarta raya

email: 202210315021@Mhs.ubharajaya.ac.id

Rachmat Pramukty Warsoyo

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding author: 202210315021@Mhs.ubharajaya.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi publik terhadap kinerja layanan publik. Objek dalam penelitian adalah Badan penanaman modal dan badan perizinan terpadu kabupaten ogan ilir. Instrumen penelitian adalah kuesoner, dimana masyarakat pengguna layanan pada badan penanaman layanan modal penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik sebagai variabel independent, sedangkan kinerja layanan publik sebagai variable independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja orhanisasi layanan publik.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi Layanan Pubik, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik

Abstract: This research aims to determine the influence of accountability, transparency and public participation on public service performance. The object of the research is the investment agency and integrated licensing agency of Ogan Ilir district. The research instrument is a questionnaire, where the service user community at the capital service investment agency in this research uses accountability, transparency and public participation as independent variables, while public service performance is the independent variable. The research results show that accountability, transparency and public participation have a positive influence on the performance of public service organizations.

Keywords: Public Service Organization Performance, Accountability, Transparency and Public Participation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permerintah daerah, sebagai organisasi sektor publik dituntut memiliki kineja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara trasparan dan berkualitas.

Menurut indra (2006) kinerja adalah gambaran kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadikan tanggungjawabnya kepada pihak memberi amanah yang memiliki pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks layanan publik, akuntabilitas harus dapat

dipertanggungjawabkan, baik pada publik maupun kepada atasan/ pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Buruknya kinerja layanan publik antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kepmenpan No.26.KEP/M.PAN/2/2004). Ini diperkuat dengan pernyataan Ioina (2003) yang mengatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dapat di pertanggungjawabkan kepada publik.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi layanan publik. Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadikan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka. Oleh karena itu, hendaknya semua proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang telah tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepmenpan No.26/KEP/M.PAN/2/2004 menegaskan, buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan karena kuantitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang tidak terlalu penting yang mempengaruhi kinerja organisasi layanan publik yaitu partisipasi publik. Partisipasi publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik. Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah karena rakyat sendirilah yang paling paham dengan kebutuhannya. Pelayanan yang partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan pemerintah. Sehingga kinerja organisasi layanan publik dapat ditingkatkan.

Artikel ini membahas pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi publik terhadap Kinerja organisasi layanan publik, suatu studi literature review dalam bidang auditing.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik?
2. Sejauhmana transparansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik?
3. Sejauhmana partisipasi publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja organisasi layanan publik.
2. Pengaruh transparansi terhadap kinerja organisasi layanan publik.
3. Pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis : menambah wawasan pengaruh dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menghasilkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan praktik yang sesungguhnya terjadi.
2. Bagi akademik : penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik.
3. Bagi Entitas Pemerintah : penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah khususnya kantor pelayanan dan perizinan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

KAJIAN TEORI

Kinerja Organisasi Layanan Publik

Kinerja Organisasi Layanan Publik kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Hendra G. Putra, 2019). Kinerja organisasi layanan publik dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input keluaran-manfaat, tetapi pada keluaran-manfaat dari program tersebut. (Hendra G. Putra, 2019)

Kinerja Organisasi Layanan Publik adalah dapat diukur dari produktifitas yang menyangkut tingkat efisiensi dan efektivitas layanan, orientasi kualitas layanan kepada pelanggan, responsivitas, responsibilitas, serta akuntabilitas publik. (Aang Kusnendra, 2018) Kinerja organisasi layanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik. Keutungan pertama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi kepuasan masyarakat. (Aang Kusnendra, 2018).

Kinerja Organisasi Layanan Publik adalah kebutuhan masyarakat. Organisasi layanan publik organisasi sangat ditekankan dalam hal melayani masyarakat, layanan tersebut harus sangat memadai dan maksimal karena tujuan utama dari organisasi tersebut adalah layanan terhadap publik. (Regita Nanda Yuliono, 2019). Kinerja Organisasi Layanan Publik adalah hal utama yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya layanan publik kepada masyarakat dengan menjalankan peran organisasi *non profit*. Layanan publik didasarkan pada fungsi, peran, kewajiban, dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik. (Regita Nanda Yuliono, 2019).

Kinerja Organisasi Layanan Publik sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Hendra G. Putra, 2019), (Aang Kusnendra, 2018), dan (Regita Nanda Yuliono, 2019).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sedarmayanti, 2018). Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *direct users* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Sedarmayanti, 2018)

Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai aktivitas pertanggungjawaban telah dilakukan suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Citra Kumala Dewi, 2019). Akuntabilitas hendaknya dapat memperbaiki kualitas dan juga kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan mengarah pada keperluan publik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagai hal yang dibutuhkan. (Citra Kumala Dewi, 2019).

Akuntabilitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi sektor publik untuk memberikan arahan atas perilaku yang dilakukan terutama pihak didalam sistem politik yang

telat diberikan wewenang untuk menjalankan penilaian serta evaluasi terhadap publik. (Isma Arum Wardiana, 2019). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas beserta kinerja dari organisasi agar dapat berorientasi pada kepentingan publik. (Isma Arum Wardiana, 2019).

Akuntabilitas ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Sedarnayanti, 2018), (Citra kumala Dewi, 2019), dan (Isma Arum Wardian, 2019).

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh perwakilan rakyat dan masyarakat secara umum. Dalam teori stakeholder, masyarakat berhak menuntut pemerintah dan mengelola dana publik, bagaimana dana tersebut dikelola dan kemana saja dana tersebut diperuntukkan. (Pesi Suryani, 2019). Transparansi adalah masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Pesi Suryani, 2019).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan kepentingan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. (Lucy Auditya, 2018). Transparansi adalah penyelenggara pemerintah yang transparansi akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka: adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan: adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tau hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. (Lucy Auditya, 2018).

Transparansi adalah yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai. (Linda Lomi G, 2020). Transparansi adalah tata pemerintah yang baik masyarakat adanya keterbukaan, ketertiban dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggara pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggara pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.(Linda Lomi G, 2020).

Transparansi sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Pesi Suryani, 2019), (Lucy Auditya, 2018), dan (Linda Lomi G, 2020).

Partisipasi Publik

Partisipasi Publik merupakan bentuk keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian suatu tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggungjawab bersama. partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyusun suatu keputusan langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan partisipasi tersebut didirikan berdasarkan dasar keleluasaan, berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. (Yunita Sukraini, 2022). Partisipasi Publik adalah yang partisipatif yang mampu mendorong serta masyarakat dalam penyelenggaraan partisipasi publik berdasarkan ambisi masyarakat. Masyarakat bisa mencurahkan keinginannya melalui lembaga yang berwenang serta menerima keluhan dan permasalahan yang dihadapi untuk ditindak lanjuti dan mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya.(Yunita Sukraini, 2022).

Partisipasi Publik adalah yang terfasilitasi hanya sebatas pengguna hak pilih dalam pemilihan dan pemberian kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak dan pemungutan lain yang bersifat legal dan sah.(Ronald Hasibuan,2019). Partisipasi Publik sesuai keinginan masyarakat sendiri masih sangat minimalis, kalau tidak bisa dikatakan nihil. Untuk itu adanya upaya terwujudnya pemerintah oleh, dari dan untuk rakyat.(Ronald Hasibuan,2019).

Partisipasi Publik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Melalui partisipasi publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap birokrasi pemerintah. (Anugrah Asmarani, 2023). Partisipasi Publik yang aktif dapat membaantu mendorong transparansi, memperkuat pengawasan, serta memperkuat pertanggungjawaban birokrasi pemerintah terhadap masyarakat. (Anugrah Asmarani, 2023).

Partisipasi Publik sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Yunita Sukraini, 2022), (Ronald Hasibuan,2019), dan (Anugrah Asmarani, 2023).

Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan akuntabilitas dengan kinerja organisasi layanan publik, Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang telah dilakukan. akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawabn, penyajian, melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2. Hubungan transparansi dengan kinerja organisasi layanan publik salah satu prinsip penting baik tidaknya kinerja pelayanan publik adalah adanya transparansi pelayanan publik. Transparansi penyelenggara pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan informasi (Keputusan Men. PAN Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004).
3. Hubungan partisipasi publik dengan kinerja organisasi layanan publik, partisipasi publik dibangun atas kebebasan berasosiasi dan berbicara. Setiap orang atau warga negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

Tabel 1**Penelitian terdahulu yang relevan**

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	(Aang Kusnendra, 2018)	Penelitian ini membahas tentang Produktivitas, kualitas layanan & responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik	Penelitian ini mengukur Kinerja, Pemerintah desa, dan layanan publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik	Penelitian ini menggunakan kinerja organisasi dalam layanan publik
2	Regita Nanda Yuliono, 2019	Kinerja & organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi	Good governance & Manajemen publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik	Penelitian ini menggunakan kinerja organisasi

3	Citra Kumala Dewi, 2019	Akuntabilitas, Transparansi dan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi	Akuntabilitas secara persial & Transparansi secara persial berpengaruh terhadap layanan publik	Penelitian ini menggunakan Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja layanan publik
.4	Linda Lomi G, 2020	Pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi	Alokasi dana desa & transparansi berpengaruh terhadap oragnisasi layanan publik	Transparansi berpengaruh terhadap layanan publik
.5	Yunita Sukraini, 2022	Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja organisasi pemerintah daerah	Partisipasi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah	Partisipasi publik, akuntabilitas & Transparansi berpegaruh terhadap kinerja organisasi
6	Anugrah Asmarani, 2023	Akuntabilitas Birokrasi dan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi publik	Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi publik	Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas layanan publik

METODE PENULISAN

Penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh terhadap suatu variable terhadap variable lainnya. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik terhadap variable bebas (*Independent variable*) terhadap kinerja organisasi layanan publik sebagai variable terikat (*dependent variable*).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan dan penanaman modal pemilihan samoel menggunakan teknik *Cinvinience sampling*, yaitu penarikan sampel sesuai dengan penelitian ini. adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat menggunakan layanan perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah data berupa persepsi atas item pernyataan yang ada dalam kuesioner dari subjek penelitian, variable terikat (*independent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variable terikat lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Publik (X3).

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan di badan penanaman modal dan pelayanan perzinan terpadu. Kuesioner diberikan secara langsung ke alamat responden yang telah terdaftar di badan penanaman modal sebagian kuesioner juga diberikan kepada responden yang ada pada saat penelitian. Pengambilan kuesioner diambil langsung dari responden maksimal dua hari setelah kuesioner diberikan.

Varibale penelitian adalah variable yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendekteksikan ataupun menerangkan variabel dalam variable terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. variable dalam penelitian ini adalah kinerja organisas layanan publik. Variabel bebas (*Indenpendent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau rasidual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah rasidual bertribusi normal maka dalama penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Dengan menggunakan taraf signifikan 0.05. data dinyatakan bertribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggunakan skala likert dengan alternatif lima jawaban, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju.

terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS= sangat setuju), 4 (S= setuju), 3 (ragu-ragu), 2 (TS= tidak setuju), 1 (STS= sangat tidak setuju). Indikator yang digunakan untuk menentukan variable Y, dan X diambil dari beberapa pendapatan para ahli dan penelitian terdahulu.

Uji validasi dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

- a. Koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R²) untuk mengetahui kontribusi dari variable bebas terhadap variabel terikat dilihat dari adjusted R square-nya, pemilihan adjusted R square karena menggunakan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu.
- b. Persamaan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda karena lebih dari 1 variabel bebas. Data diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 17.0.

Persamaan model regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja organisasi layanan publik

a = Konstanta

b_{1,2,3} = Koefisien regresi dari variable independen

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

X₃ = Partisipasi

e = Epsilon (variable-variable independen yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variable dependen).

Definisi Operasional

1. Kinerja organisasi layanan publik. Kinerja organisasi layanan publik merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pasaman barat dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasinya.
2. Akuntabilitas, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan

efektif. Akuntabilitas dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pasaman barat dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh masyarakat yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

3. Transparansi keterbukaan badan penanaman modal dan pelayanan perizinana terpadu pasaman barat dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi, khususnya pengguna layanan perizinan. Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan kepada masyarakat.
4. Partisipasi publik adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggara pemerintah. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas secara konstruktif.

Analisis agresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$.

$$Y = 5,837 + 0,964 (X_1) + 0,266 (X_2) + 0,563 (X_3)$$

Dimana :

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Partisipasi Publik

Y = Kinerja organisasi layanan publik

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan dibahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 5,837 yang berarti bahwa tanpa adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik pada kinerja organisasi layanan publik, nilai variabel kinerja organisasi layanan publik berapa pada 5,837.
- b. Koefisien akuntabilitas sebesar 0,964 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas satu satuan akan mengakibatkan peningkatana kinerja organisasi layanan publik sebesar 0,964 satuan variable X_1 bernilai positif 0,964.
- c. Koefisien transparansi sebesar 0,266 mengidikasikan bahwa setiap peningkatan transparansi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja organisasi layanan publik sebesar 0,266 variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,266.

- d. Koefisien partisipasi publik sebesar 0,563 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan partisipasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja organisasi layanan publik sebesar 0,563 satuan variabel X_3 bernilai positif.

Penguji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha < 0,05$.

Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,6608.

- a. Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .

Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha < 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha < 0,05$ adalah 1,6608. Untuk variabel akuntabilitas (X_1) nilai t_{hitung} adalah 6,121 dan nilai sig adalah 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,121 > 1,6608$ atau nilai signifikan $0,000 < \alpha < 0,05$. Variable X_1 bernilai positif yaitu 0,964.

- b. Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha < 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha < 0,05$ adalah 1,6608. Untuk nilai variabel transparansi (X_2) nilai t_{hitung} adalah 2,393 dan nilai sig adalah 0,019. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,393 > 1,6608$ atau nilai signifikan $0,019 < \alpha < 0,05$ variabel (X_2) bernilai positif yaitu 0,266.

- c. Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha < 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha < 0,05$ adalah 1,6608. Untuk variabel partisipasi publik (X_3) nilai t_{hitung} adalah 2,436 dan nilai sig adalah 0,017. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,436 dan nilai sig adalah 0,17. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,436 > 1,6608$ atau signifikan $0,017 < \alpha < 0,05$ variabel (X_3) bernilai positif yaitu 0,563.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik dengan nilai $t = 6,121$ dan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi, maka kinerja organisasi layanan publik juga semakin meningkat. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi layanan publik (Hendra G. Putra, 2017).

Untuk meningkatkan Kinerja organisasi layanan publik instansi pemerintah dituntut menyelenggarakan layanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan penyelenggara layanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit layanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Aang Kusnendra,2018).

Akuntabilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas organisasi layanan publik, apabila akuntabilitas dalam pelayanan publik, dalam peraturan daerah akuntabilitas layanan publik pada dasarnya berisi aturan pokok tentang kewajiban penyelenggara pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang komitmen tentang tingkat layanan yang diberikan sesuai atau tidak. Jika suatu daerah yang menerapkan dengan baik akuntabilitas, maka semakin baik pula kinerja organisasi layanan publik. (Citra Kumala Dewi, 2019).

Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja organisasi layanan publik, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Hendra G Putra,2019), (Aang Kusnendra,2018), dan (Citra Kumala Dewi, 2019).

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik dengan nilai $t = 2,393$ dan nilai signifikan $0,019 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi, maka kinerja organisasi layanan publik juga akan semakin tinggi. (Pesi Suryani, 2019).

Transparansi yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Keterbukaan pemerintah atas beberapa aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.(Lucy Auditya, 2018).

Transparansi ini dilaksanakan tentu tidak akan terjadi kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Jika masyarakat tidak puas dengan hal tersebut, maka kinerja organisasi layanan publik itu akan dinilai buruk oleh masyarakat.(Linda Lomi G, 2020).

Trasparansi berpengaruh terhadap Kinerja organisasi layanan publik, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Pesi Suryani, 2019), (Lucy Auditya, 2018), dan (Linda Lomi G, 2020).

3. Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik dengan nilai $t = 2,436$ dengan nilai signifikan $0,017 > \alpha =$

0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi, maka kinerja organisasi layanan publik juga akan semakin meningkat. (Yunita Sukraini, 2022).

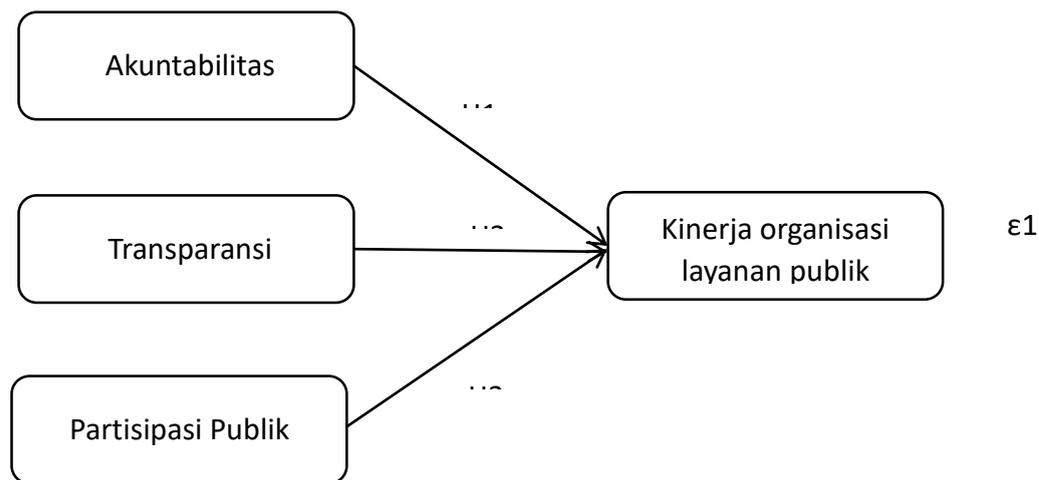
partisipasi yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi layanan publik. Partisipasi tidak hanya dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat didalam pemilu saja. Masih banyak pola perilaku informal yang dapat dijadikan patokan dalam menilai tingkat partisipasi dalam suatu masyarakat. Bentuk-bentuk perilaku masa seperti protes, aksi pamflet, ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi (Ronald Hasibuan,2019).

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Jika suatu daerah yang menerapkan dengan baik partisipasi publik, maka semakin baik pula kinerja organisasi layanan publik. (Anugrah Asmarani, 2023).

x3 berpengaruh terhadap y1, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Yunita Sukraini, 2022), (Ronald Hasibuan,2019), dan (Anugrah Asmarani, 2023).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkap dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu kinerja pelayanan publik sebagai variabel dependen dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik sebagai variabel independen. Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Hipotesis berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik
H2 : Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik
H3 : Partisipasi Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik

Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Kinerja Organisasi Layanan Publik, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Akuntabilitas Birokrasi: (Anugrah Asmarani, 2023)
- b) Responsivitas: (Aang Kusnendra, 2018)
- c) Transparansi secara persial: (Citra kumala Dewi, 2019), (M. Iqbal A, Fadli moh, 2019)
- d) Kualitas layanan: (Pesi Suryani, 2019)
- e) kinerja organisasi pemerintah daerah : (Yunita Sukraini, 2022)
- f) Produktivitas: (Regita Nanda Yuliono, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik”

1. Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar akuntabilitas maka semakin besar tingkat kinerja organisasi layanan publik.
2. Transparansi mempunyai berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar transparansi maka semakin tinggi tingkat kinerja organisasi layanan publik.
3. Partisipasi Publik mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar patisipasi publik maka semakin tinggi tingkat kinerja organisasi layanan publik.

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terbatat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari modal penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 67,9% sedangkan 32,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diketahui.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuisioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalm pengumpulan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah

1. Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pasaman Barat sudah dinilai baik. Namun, harus lebih ditingkatkan lagi. Diantaranya dengan meningkatkan kemampuan petugas dalam melayani, serta terus untuk meningkatkan kecepatan pelayanannya.

2. mengenai akuntabilitas, pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban maka akan mempengaruhi kinerja organisasi layanan publik. Untuk itu pemerintah dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas dengan baik sehingga kinerja pemerintah juga dinilai baik oleh masyarakat.
3. Transparansi juga dinilai baik, namun pemerintah belum sepenuhnya transparan. oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah harus lebih transparan dalam memberikan kepastian rincian dan biaya pelayanan juga kepastian kurun waktu pelayanan. Penyuluhan secara langsung kepada masyarakat mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk hal ini.
4. Mengenai Partisipasi Publik memang sudah dinilai baik, namun masih belum maksimal. Pemerintah sebaliknya mendorong untuk diadakannya forum-forum ataupun diskusi-diskusi yang nantinya menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat juga hendaknya menyadari bahwa partisipasi mereka dalam meningkatkan kinerja organisasi layanan publik.

Bibliography

- Adrinal. Et al. 2007. *Mewujudkan Good Local Governance Di Kota Solok*. Jakarta: STIA Kawula Indonesia
- Andarias Bangun. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Universitas Sumatera Utara
- Imam, Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Husein, Umar. 1999. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andriani, Matia (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)*. E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa.
- Gayatri, Made Yeni Latrini & Ni Luh Sari Widhiyani. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. JEKT 10 [2] : 175- 182 pISSN : 2301 - 8968 eISSN : 2303 – 0186
- Aucoin, P. dan R, Heintzman. (2000). *The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform*. *International Review of Administration Science* (66).45- 55.
- Bhardwaj, A. (2013). *Managerial Competencies and Their Influence on managerial Performance*. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*. 5 (2).
- Erina, Cut dan Darwanis. 2012. *Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (studi pada Inspektorat Aceh)*. ISSN 2302-0164 *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 2 Nomor 1. Hal 15-27
- Permana, Imam Arif. 2015. *Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan)*. Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, M. S. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang*

- Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal MODERAT, 5(1), 5.
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman Taufik. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember." Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2. Universitas Jember. Dipublikasika.
- Calise, Mauro and Theodore J. Lowi. (2010). Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept. Chicago: The University of Chicago.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.(Online). (diakses 14 Mei 2013) tersedia di World Wide Web
- Lutfi, M., & I.M., Satriawan. 2014. Meneropong Komisi Informasi Publik. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Dwiyanto, dkk. 2017. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga